



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

MODEL INOVASI

PELAYANAN PUBLIK

BIDANG PENGENTASAN KEMISKINAN

*Pembelajaran pengentasan kemiskinan melalui
inovasi pelayanan publik*

2023





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

MODEL INOVASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENGENTASAN KEMISKINAN

DISUSUN OLEH:

AGUNG PUTU ISKANDAR, S.S

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup.....	2
BAB II PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA	3
A. Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia	3
B. Inovasi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.....	5
BAB III MODEL INOVASI PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS INTERVENSI SEKUENSIAL	7
A. Intervensi dalam Perbaikan Data.....	8
B. Intervensi dalam Pemberian Bantuan dan Jaminan Sosial.....	10
C. Intervensi dalam Perbaikan Lingkungan	12
D. Intervensi dalam Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi	14
E. Intervensi dalam Pemberdayaan Ekonomi	16
BAB IV PENDEKATAN STRATEGIS DALAM INOVASI PENGENTASAN KEMISKINAN	18
A. Pendekatan Strategis dalam Perbaikan Data	18
B. Pendekatan Strategis dalam Pemberian Bantuan Sosial.....	21
C. Pendekatan Strategis dalam Perbaikan Lingkungan.....	24
D. Pendekatan Strategis dalam Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi ..	26
E. Pendekatan Strategis dalam Pemberdayaan Ekonomi	28
BAB V PEMBELAJARAN DARI INOVASI PENGENTASAN KEMISKINAN	31
A. Profil Inovasi	31
B. Proses.....	31
C. Strategi	33
D. Penguatan Keberlanjutan	34
DAFTAR PUSTAKA	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu isu utama yang dihadapi Indonesia. Sebagai isu prioritas, pemerintah telah merumuskan sejumlah kebijakan dan berbagai intervensi program pengentasan kemiskinan. Di antaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemberian bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, penguatan infrastruktur kesehatan, dan lain-lain.

Selain kebijakan dan program tersebut, beberapa instansi pemerintah juga melakukan terobosan baru atau inovasi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Inovasi menjadi pilihan solusi yang efektif dan efisien untuk menangani masalah kemiskinan karena dianggap mampu untuk mengakselerasi berbagai upaya yang selama ini dilakukan dengan cara-cara konvensional, menjadi langkah-langkah kreatif, baru, dan kolaboratif.

Sebagai pembina inovasi pelayanan publik nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) turut berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan mendorong instansi pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014, pelaksanaan KIPP telah menjangkau 1.065 Top Inovasi dan 60 di antaranya terkait dengan pengentasan kemiskinan.

Beragam pendekatan digunakan instansi pemerintah dalam berbagai inovasi pengentasan kemiskinan. Ada yang menggunakan pendekatan penyelesaian dengan intervensi di hulu seperti perbaikan tata kelola data kemiskinan, ada pula yang di hilir dengan memberikan bantuan sosial. Selain itu, juga terdapat berbagai inovasi yang fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin melalui peningkatan akses pendidikan, akses kesehatan, perbaikan lingkungan, dan lain-lain. Beragam pendekatan tersebut disesuaikan dengan konteks dan kondisi di instansi atau wilayah masing-masing.

Untuk mendorong agar dampak inovasi dapat menjadi lebih luas, Kementerian PANRB juga melakukan strategi pengembangan inovasi melalui replikasi. Saat melakukan replikasi inovasi, kecocokan inovasi yang akan direplikasi dengan kebutuhan, karakteristik wilayah, dan kemampuan instansi sangat krusial dalam menentukan keberhasilan replikasi. Guna memudahkan proses replikasi inovasi, Kementerian PANRB berinisiatif untuk menyusun Model Inovasi Pelayanan Publik, sebuah referensi pembelajaran yang diperoleh dari pemodelan inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan yang ada. Penyusunan model ini mencoba memberi gambaran secara lebih menyeluruh terhadap intervensi pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan instansi pemerintah melalui pendekatan yang inovatif.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Model Inovasi Pelayanan Publik Bidang Pengentasan Kemiskinan adalah:

1. Sebagai referensi pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk mencapai target RB Tematik khususnya di bidang pengentasan kemiskinan melalui inovasi pelayanan publik
2. Sebagai referensi pembelajaran bagi pemerintah daerah, untuk melakukan penciptaan dan pengembangan inovasi pelayanan publik dalam mengentaskan kemiskinan sesuai dengan karakter dan kondisi di masing-masing daerah.

C. Ruang Lingkup

Sebagai sebuah pemodelan inovasi, penyusunan Model Inovasi Pelayanan Publik Bidang Pengentasan Kemiskinan, dibatasi berdasarkan hasil identifikasi Top Inovasi KIPP yang mengangkat isu pengentasan kemiskinan. Dalam melakukan pemodelan, digunakan pendekatan skema sekuensial dengan metode graduasi kemiskinan yang dikembangkan lembaga nonpemerintah BRAC melalui program Ultra Poor Graduation Initiative (UPGI) yang banyak berkiprah di Bangladesh.

Skema ini digunakan untuk membantu memetakan dan mengidentifikasi intervensi atau pendekatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan instansi pemerintah peraih Top Inovasi Pelayanan Publik KIPP. Namun demikian, Kementerian PANRB juga masih membuka peluang dengan penggunaan pendekatan atau skema yang lain dalam penyusunan model inovasi di bidang pengentasan kemiskinan berikutnya.

BAB II PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

A. Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Badan Pusat Statistik memaknai kemiskinan dalam sebuah konsep ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan definisi tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk menentukan apakah seseorang dikategorikan miskin, BPS menentukan garis kemiskinan (GK) dengan memroyeksikannya pada nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK tersebut terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM).

GK pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp 550.458,00 per kapita per bulan per orang dengan komposisi GKM sebesar Rp 408.522,00 dan GKNM sebesar Rp 141.93,006. Pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.592.657,00 per rumah tangga per bulan. Dengan batas pendapatan tersebut, BPS menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang atau 9,36 persen (BPS, 2023).

Selain pengertian kemiskinan secara umum yang dirumuskan BPS di atas, definisi kemiskinan ekstrem juga penting untuk dipahami karena isu ini juga menjadi prioritas pemerintah (PBB, 1996). Kemiskinan ekstrem memiliki definisi berbeda, baik secara terminologi maupun secara statistik. Secara terminologi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) melalui Keputusan Menko PMK Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, menyebutkan bahwa **kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar**. Kebutuhan dasar tersebut yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem secara global, Bank Dunia merilis secara reguler kategori kemiskinan absolut atau kemiskinan ekstrem. Kategori-kategori tersebut selalu menjadi acuan dalam menghitung batas pengeluaran seseorang untuk masuk dalam kemiskinan ekstrem.

Bank Dunia dalam pemutakhiran definisi per September 2022 menyebutkan bahwa garis kemiskinan ditentukan oleh batas paritas daya beli alias *purchasing power parity* (PPP), yakni USD 2,15 per orang per kapita per hari (World Bank, 2022). Dengan asumsi kurs Rp 15.234 per dolar AS, maka garis kemiskinan Bank Dunia adalah Rp 32.812 per kapita per hari atau Rp

984.360 per kapita per bulan. Namun, angka tersebut kembali direvisi oleh Bank Dunia pada Juli lalu. Dalam perhitungan terbarunya, lembaga keuangan global itu menetapkan garis kemiskinan ekstrem menjadi USD 3,2 per orang per kapita per hari.

Khusus untuk kemiskinan ekstrem, pemerintah memberi perhatian khusus dengan mencanangkan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) sebagai bagian dari poin pertama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Pada tahun 2021, PPKE dilaksanakan di 35 kabupaten/kota prioritas dalam 7 provinsi representasi 20 persen total masyarakat miskin. Komitmen pemerintah semakin diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Penghapusan kemiskinan ekstrem dipercepat dari target SDGs, dari target nol kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 menjadi tahun 2024. Inpres ini mengamanatkan 22 (dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Fokus program juga diperluas. Dari 212 kabupaten/kota prioritas di 25 provinsi, pada 2023-2024 menjadi 514 kabupaten/kota di 34 provinsi. Sebagai tindak lanjut dari Inpres ini, maka telah diterbitkan Surat Keputusan Wilayah Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2022-2024 (Majalah Tempo, 2022).

Beberapa regulasi pendukung lainnya juga diterbitkan untuk mendorong percepatan capaian program tersebut, di antaranya Surat Keputusan Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Surat Keputusan Satuan Tugas Pengelola Data P3KE. Pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui tiga cara, yakni bantuan sosial atau subsidi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem, pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, dan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar untuk penurunan kantong-kantong kemiskinan. Langkah-langkah pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah saat ini sebenarnya sudah masuk dalam tiga strategi tersebut. Dalam strategi mengurangi beban pengeluaran, pemerintah sudah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Indonesia Pintar, Badan Penyelenggara Bantuan Kesehatan – Penerima Bantuan Iuran (BPJS – PBI), dan khusus di masa pandemi Covid-19, pemerintah juga menyelenggarakan program seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk upaya bantuan sosial dan subsidi. Untuk strategi peningkatan pendapatan, beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah antara lain Program Kartu Prakerja, Padat Karya Tunai Desa (PKDT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pemberian akses permodalan melalui program seperti pembiayaan Ultra Mikro (Umi) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

B. Inovasi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan secara sederhana dalam kalimat “***poverty is pronounced deprivation in well-being***”, yakni sebuah situasi di mana seseorang kehilangan kesejahteraan. Dalam kalimat yang lebih spesifik, mereka yang miskin adalah *those who do not have enough income or consumption to put them above some adequate minimum threshold* atau yang tidak memiliki pendapatan yang cukup dalam batas minimum tertentu (Azevedo).

Jika kemiskinan adalah kondisi hilangnya kesejahteraan, lalu apa itu kesejahteraan? Clayton M. Christensen dalam buku *The Prosperity Paradox* menyebutkan bahwa kesejahteraan atau *well-being* atau bisa disebut juga dengan *prosperity*, tidak sama dengan kekayaan.

Ada sejumlah kategori-kategori tertentu yang bisa digunakan untuk membingkai kesejahteraan. Di antaranya, akses terhadap pendidikan, jaminan kesehatan, keselamatan dan keamanan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Indeks Kesejahteraan Legatum menggunakan matriks-matriks tersebut di atas dengan tambahan aspek-aspek lingkungan hidup.

Maka, upaya menyejahterakan masyarakat sejatinya adalah proses peningkatan pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik yang terus menerus. Instrumen untuk melakukannya adalah dengan melakukan berbagai inovasi, baik inovasi berupa cara baru atau melakukan replikasi dengan cara memodifikasi dari cara-cara yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Harvard’s Theodore Levitt, seorang ekonom asal Amerika mengemukakan definisi dari inovasi adalah kemampuan mengaplikasikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan dan peluang yang ada untuk lebih memakmurkan kehidupan masyarakat. Jadi inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru (Suryana, 2014).

Karena itu, diperlukan inovasi program pengurangan kemiskinan (Irawan, 2020). Inovasi dalam pengentasan kemiskinan memungkinkan sinergi berbagai *stakeholder* di masyarakat melalui konsep sinergi *pentahelix ABCGM* (*academic, business, community, government, and media*) yang melibatkan mulai dari akademisi, badan usaha, komunitas, pemerintah, dan media. Sinergi tersebut memungkinkan semua pihak mendapatkan *benefit* yang kemudian menopang keberlanjutan inovasi.

Tantangannya adalah, tidak semua daerah mampu menciptakan inovasi yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dosen Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Heruanto Hadna mengatakan bahwa sebagian pmda masih terbelenggu pada birokrasi yang kaku. Akibatnya, tidak ada ruang kreatif dan inovatif (Kustiasih, 2020). Pemahaman yang terbatas tentang inovasi membuat kepala daerah tidak cukup memiliki cakrawala bahwa inovasi lebih dari sekadar program berbasis teknologi informasi atau digitalisasi. Padahal, titik berat inovasi adalah pada kekuatan berpikir dan menemukan ide-ide terobosan baru yang bisa membawa kesejahteraan rakyat dan perbaikan bagi pelayanan publik.

**Siklus Inovasi Pelayanan Publik menurut OECD
Observatory of Public Sector Innovation (OPSI)**



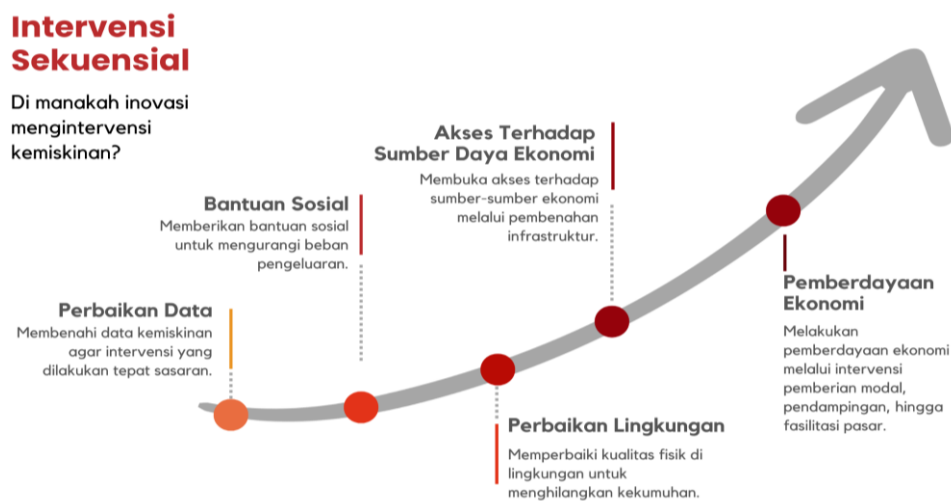
Gambar 1 Siklus Inovasi Pelayanan Publik

Studi dari Observatory of Public Sector Innovation (OPSI), lembaga yang menjadi bagian dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang berfokus pada inovasi pelayanan publik, menunjukkan bahwa inovasi tidak akan muncul dari kondisi birokrasi yang mapan, apalagi yang sudah bertahun-tahun tidak pernah mengembangkan terobosan yang berarti. Inovasi tidak akan muncul jika sebuah lembaga tidak memiliki kapasitas, pengalaman, dan motivasi untuk melakukannya (OECD, 2020). Salah satu *tools* yang dikembangkan OECD adalah *The Public Sector Innovation Lifecycle*. Melalui *tools* tersebut, organisasi atau lembaga bisa mengembangkan instrumen pemecahan masalah yang terus diperbaiki dalam sebuah siklus. *Innovation Lifecycle* membuat instansi pemerintah memperbaiki layanannya sampai inovasi benar-benar mengatasi masalah melalui pengembangan program pengentasan kemiskinan yang terus menerus (*continuous improvement*).

BAB III

MODEL INOVASI PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS INTERVENSI SEKUENSIAL

Sekuens atau *sequence* secara bahasa bisa dimaknai sebagai sebuah urutan peristiwa. Bisa juga dimaknai sebagai sebuah kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berurutan. Dalam konteks intervensi terhadap kemiskinan, sekuens bisa dimaknai sebagai tata urutan intervensi dalam menangani kemiskinan. Dari data inovasi di KIPP, terdapat berbagai jenis intervensi yang ditemukan baik di tataran data, bantuan sosial, ekonomi, lingkungan, dan lainnya. Keragaman ini sejalan dengan konsep graduasi kemiskinan yang diperkenalkan oleh lembaga non-pemerintah



BRAC melalui program Inisiatif Pemberdayaan Ultra Miskin (UPGI) yang aktif di Bangladesh.

Gambar 2 Konsep Intervensi Sekuensial dalam Pengentasan Kemiskinan

Membagi berbagai macam inovasi dalam sekuens membuat kita bisa menempatkan berbagai intervensi dalam unit-unit waktu yang meski terpisah sebenarnya saling berhubungan. Pembagian intervensi dalam sekuens-sekuens bertujuan agar satu inovasi tidak harus menanggung begitu banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan. Sebab, mendorong masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan bukan hanya pekerjaan berat, tapi pekerjaan yang panjang. Dengan membaginya pada sekuens-sekuens, inovator bisa memilih target prioritas yang bisa dikejar dalam jangka pendek atau jangka panjang. Pendekatan sekuensial juga berguna bagi inovator untuk membagi mana masalah yang harus diselesaikan oleh inovasi yang mereka kembangkan hari ini, dan mana masalah yang akan diatasi oleh inovasi selanjutnya berdasarkan hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dari inovasi pertama. Pendekatan sekuensial penting untuk memecah-mecah permasalahan sekaligus melihatnya dalam konsep yang terintegrasi karena saling berurutan (Kumar, 2023).

Dalam pendekatan sekuensial, pengentasan kemiskinan tidak hanya membutuhkan intervensi yang tepat melainkan juga waktu yang tepat. Kesalahan

dalam *timing* intervensi akan berakibat fatal pada tingkat kesuksesan program. Selain itu, gap waktu antar sekuens juga harus diantisipasi agar tidak ada kekosongan intervensi yang bisa membuat pencapaian pengentasan kemiskinan berisiko mundur karena menciptakan masalah baru. Misalnya setelah pemberian bantuan bahan-bahan produksi, tidak ada kelanjutan tentang akses pasar. Akibatnya, masyarakat penerima bantuan tidak percaya lagi pada program. Bahan-bahan produksi pun dijual dan kondisi mereka tidak berubah.

Sekuens juga penting untuk memastikan bahwa rangkaian inovasi yang dikembangkan berjalan secara rasional. Contoh sederhananya, intervensi awal terhadap masyarakat miskin adalah pada bantuan bahan-bahan pokok, bukan pada pemberdayaan ekonomi. Sebab, mustahil mendorong mereka untuk menggeluti usaha kecil pada saat yang sama mereka masih berpikir bagaimana untuk bertahan hidup. Semua intervensi pemberdayaan ekonomi pada akhirnya akan jatuh pada kebutuhan konsumsi, bukan pada penciptaan aset ekonomi.

Dalam melakukan sekuensi, kita harus memastikan bahwa setiap sasaran program mendapatkan *benefit* program secara maksimal. Dan dalam setiap sekuensi, wajib untuk mengidentifikasi komponen-komponen penting dalam intervensi. Artinya, jika sekuensi yang sama hendak dilakukan di tempat lain, maka komponen-komponen tersebut harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil maksimal. Dengan demikian, upaya sekuensi dalam intervensi program kemiskinan adalah juga memastikan bahwa kinerja pemerintah optimal membantu komponen-komponen tersebut terpenuhi secara maksimal.

Lima sekuensi tersebut relatif berurutan dalam mengintervensi kemiskinan. Dan di semua sekuensi tersebut, terdapat inovasi-inovasi dalam Top Inovasi Pelayanan Publik yang berhasil mengatasi masalah dalam tahapan sekuensinya. Lima urutan tersebut linier dengan strategi pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 melalui strategi mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan perluasan akses pelayanan dasar untuk membangun SDM.

A. Intervensi dalam Perbaikan Data

Perbaikan data menjadi intervensi pada sekuensi pertama karena intervensi ini menjadi dasar sebelum dilakukan berbagai intervensi pengentasan kemiskinan. Dengan data yang valid, berbagai strategi kebijakan untuk mengintervensi kemiskinan bisa tepat sasaran. Validitas data ini penting karena tanpa data, efektivitas program pengentasan kemiskinan tidak akan bisa diukur. Mustahil mengatasi kemiskinan jika data kemiskinan tidak akurat. **Tanpa data yang jelas, semua intervensi terhadap warga miskin berpotensi salah sasaran.** Akibatnya, kebijakan jadi tidak terukur. Imbasnya, masyarakat yang dirugikan karena upaya untuk mengentaskan mereka dari jurang kemiskinan tak pernah berhasil. Kelemahan mendasar itu harus diantisipasi lebih dulu sebelum melangkah lebih jauh.

Data kemiskinan yang akurat, valid, dan terkini penting bagi pengambil kebijakan karena memberikan gambaran menyeluruh tentang warga miskin.

Data ini harus mencakup aspek demografi, geografi, pendidikan, dan kapasitas produktif, bukan hanya informasi teknis. Bank Dunia juga menyoroti pentingnya sistem data nasional dalam mengurangi kemiskinan, menyebutnya sebagai senjata efektif untuk transformasi kehidupan warga miskin. Presiden Grup Bank Dunia David Malpass mengatakan bahwa data yang akurat, yang dikumpulkan dengan metode digitalisasi maupun konvensional, menyediakan potensi besar untuk pengembangan program dan kebijakan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Sistem data yang efektif akan menopang intervensi yang efektif pula yang pada gilirannya akan mempengaruhi kerangka kerja pemerintah (World Bank, 2021).

Berdasarkan data pula, kategorisasi kemiskinan daerah tertentu bisa dikembangkan. Hal ini untuk menentukan intervensi selanjutnya. Misalnya, kemiskinan yang disebabkan karena kondisi difabel yang cenderung lebih banyak menggantungkan hidupnya pada bantuan sosial. Begitu juga kemiskinan dalam bentuk lansia yang hidup sebatang kara. Tak hanya bantuan sosial tapi justru perlu menciptakan urgensi penanganan kesehatan dengan koordinasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas terdekat, misalnya.

Untuk memiliki data kemiskinan yang valid, reliabel, dan *update*, **dibutuhkan kolaborasi berbagai perangkat pemerintah**, terutama petugas lapangan. Partisipasi masyarakat juga perlu dibuka lebar-lebar agar mereka bisa melaporkan dirinya atau orang lain yang hidup dalam kemiskinan. Meski pintu pelaporan dibuka, tidak berarti bahwa semua yang mengklaim dirinya miskin akan dikabulkan. Diperlukan konsolidasi data yang melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan akurasi data dan menyajikan informasi komprehensif mengenai warga miskin.

Verifikasi dan validasi data kependudukan, termasuk pembaruan KK, akta kelahiran, dan KTP, mendukung penanganan kemiskinan. Kementerian PPPA mencatat, dari 84 juta anak, 6,22% atau sekitar 5 juta anak tak memiliki akta kelahiran (Purnamasari & Erdianto, 2021). Hal ini berdampak pada akses pendidikan, meningkatkan kasus perkawinan anak dan pekerja anak, serta adopsi ilegal yang turut memperdalam kemiskinan. Praktik peminjaman KTP antarwarga dan penggunaan KTP tak terkini juga mengganggu akurasi data dan berdampak pada inovasi yang malah memperparah masalah, bukan menyelesaikannya. Catatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada awal 2021 hingga awal 2023 menyebutkan kerugian negara akibat bantuan sosial salah sasaran mencapai Rp 523 miliar per bulan. Ditemukan pula 23.800 aparatur sipil negara (ASN), 14.000 pengurus atau pemilik badan hukum, serta 493.000 peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menerima bansos (Gandhawangi, 2023).

Pentingnya Perbaikan Data dalam Inovasi Pengentasan Kemiskinan:

1. **Fondasi Intervensi yang Tepat:** Data valid, reliabel, dan terkini adalah fondasi untuk intervensi yang tepat sasaran dan relevan. Tanpa data

yang akurat, risiko intervensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat miskin sangat tinggi.

2. **Aspek Strategis:** Data merupakan komponen kunci dalam strategi pengentasan kemiskinan. Melalui analisis data, assessment, dan targeting, langkah-langkah intervensi yang lebih tepat dan efisien bisa diambil.
3. **Landasan Langkah Strategis:** Data berkualitas tentang kemiskinan memungkinkan pengambilan langkah strategis yang terukur. Ini membantu dalam merancang program-program yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan.
4. **Menghindari Kesalahan Sasaran:** Perbaikan data bertujuan untuk mencegah kesalahan sasaran dalam inovasi pengentasan kemiskinan. Dengan data yang akurat, program-program dapat diarahkan secara tepat sesuai kebutuhan.
5. **Mengukur Efektivitas:** Data memungkinkan penilaian yang lebih terukur terhadap output dan outcome dari intervensi pengentasan kemiskinan. Hal ini memungkinkan evaluasi lebih akurat terhadap efektivitas program yang diterapkan.
6. **Pengembangan Data Lokal:** Karena perbedaan versi data kemiskinan di berbagai daerah, pengembangan data lokal yang dipercaya oleh masyarakat setempat menjadi penting. Hal ini menjadi titik awal yang valid untuk pengentasan kemiskinan yang efektif di tingkat local.

B. Intervensi dalam Pemberian Bantuan dan Jaminan Sosial

Pemberian bantuan dan jaminan sosial menjadi sekuensi intervensi setelah konsolidasi data. **Bantuan sosial memegang peranan penting dalam inovasi pengentasan kemiskinan karena mampu langsung mengurangi beban pengeluaran.** Pemberian bantuan dan jaminan sosial menjadi langkah pertama setelah perbaikan data karena konteks urgensi. Jika masyarakat miskin oleh Bank Dunia didefinisikan dalam kalimat “kemiskinan adalah perampasan kesejahteraan yang nyata”, maka tujuan bantuan sosial adalah untuk membantu mengembalikan kesejahteraan yang hilang itu. Apalagi jika mengacu pada definisi kemiskinan ekstrem menurut Kementerian PMK, yakni kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.

Bantuan sosial menjadi pertolongan awal bagi warga miskin yang tak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Program-program seperti PKH, Program Sembako, Indonesia Pintar, dan BPJS Kesehatan bertujuan membantu warga bertahan hidup. Di Indonesia, intervensi terhadap kemiskinan telah lama melibatkan program bantuan sosial. Selama pandemi Covid-19, pemerintah juga meluncurkan program BLT sebagai bentuk bantuan sosial dan subsidi

tambahan. Program ini mendukung kebutuhan dasar warga miskin yang tak dapat terpenuhi secara mandiri.

Padaahal, pemberian bantuan sosial seharusnya menjadi bagian dari orkestrasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Bantuan sosial yang biasanya hanya diberikan begitu saja seharusnya bisa dioptimalkan melalui sinergi dan integrasi dengan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Misalnya, bantuan sosial juga diberikan kepada warga yang baru memulai usaha mikro hingga waktu tertentu untuk memberi kesempatan sampai usahanya berkembang.

Dengan strategi ini, bantuan sosial menjadi bantalan sementara bagi masyarakat miskin agar mereka bisa bertransformasi dari pengangguran atau setengah penganggur menjadi pelaku usaha mikro. Warga miskin yang mendapat “insentif” ini pun jadi lebih berani untuk memulai usaha. Proses transformasi inilah yang kemudian didorong prosesnya melalui bantuan sosial. Mendorong warga untuk beralih dari pekerja harian lepas menjadi pelaku usaha mikro tidak hanya memberi mereka kesempatan untuk lulus dari garis kemiskinan tapi juga secara strategis berpotensi membuka lapangan kerja. Sebab, UMKM adalah *critical engine* perekonomian nasional dengan penyerapan tenaga kerja nasional mencapai 96,9 persen (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, 2022). Dan usaha mikro memiliki *barrier to entry* yang rendah sehingga relatif bisa dijangkau oleh warga miskin.

Meskipun demikian, warga dengan profil kemiskinan tertentu seperti penyandang disabilitas, lansia, atau yatim piatu, akan tetap masuk dalam daftar “tetap” penerima bantuan sosial. Mereka umumnya berada di level garis kemiskinan ekstrem dan tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinan karena keterbatasan mereka. Karena itu, tidak banyak program-program pemberdayaan yang bisa dilakukan untuk graduasi. Namun, jumlah mereka umumnya hanya sebagian kecil karena kemiskinan reguler dominan dihuni masyarakat usia produktif—meski klaim ini juga perlu dibuktikan dengan konsolidasi data daerah seperti yang dibahas pada sekuens sebelumnya.

Pentingnya Bantuan Sosial Penting dalam Inovasi Pengentasan Kemiskinan:

1. Pemberian bantuan sosial merupakan perwujudan langsung strategi pertama pengentasan kemiskinan yang dirumuskan Kementerian PPN/Bappenas, yakni mengurangi beban pengeluaran.
2. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat adalah untuk membantu mereka bertahan hidup sementara, bukan untuk menanggung hidup mereka seterusnya. Masalah muncul karena masyarakat miskin berupaya mati-matian untuk tetap masuk dalam daftar penerima bantuan
3. Dengan jumlahnya yang terbatas, bantuan sosial bisa dibatasi berdasarkan tahun penerimaan bantuan. Misalnya, bantuan sosial

- hanya diberikan maksimal kepada penerima selama maksimal 5 tahun untuk dialihkan kepada masyarakat lain yang belum pernah menerima.
4. Dalam lapisan-lapisan kategori kemiskinan, ada yang disebut dengan masyarakat rawan miskin. Kelompok ini disebut rawan miskin karena pendapatan keluarga yang tidak terlalu besar membuat mereka langsung jatuh miskin, salah satunya, karena sakit. Karena itu, bantuan berupa pertanggung BPJS akan membantu menguatkan mereka.
 5. Meski bantuan sosial dianggap tidak mampu menyelesaikan kemiskinan, namun ada beberapa kelompok kecil masyarakat yang hidupnya sangat bergantung pada bantuan, misalnya masyarakat difabel atau lansia sebatang kara.

C. Intervensi dalam Perbaikan Lingkungan

Pendekatan dalam pengentasan kemiskinan bisa dilakukan dalam dua jenis. Pertama, pendekatan spesifik; kedua, pendekatan sensitif. Pendekatan spesifik berarti bahwa program pengentasan kemiskinan menysasar orang per orang. Program ini mengintervensi masyarakat secara individu karena profil kemiskinan mereka. Pendekatan pengentasan kemiskinan spesifik ini bisa dilihat dalam pemberian bantuan sosial yang langsung diberikan kepada setiap individu penerima bantuan, atau juga inovasi-inovasi yang bersifat bantuan seperti pemberian sembako dan program PBI. Sebaliknya, **pendekatan sensitif lebih bersifat komunal, tidak menysasar individu tapi menysasar masyarakat sebagai komunitas.** Intervensi sensitif ini lebih banyak menysasar masalah-masalah yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap kemiskinan. Dalam pendekatan sensitif, program-program yang dikembangkan lebih bersifat perbaikan ekosistem kehidupan masyarakat miskin, terutama pada hal-hal yang ikut mempengaruhi kondisi kemiskinan mereka.

Setelah intervensi perbaikan data dan bantuan sosial yang menysasar individu, pengentasan kemiskinan tahap berikutnya mulai meluas dengan melakukan pendekatan sensitif. Salah satu pendekatan sensitif tersebut adalah perbaikan lingkungan. Sebab, lingkungan yang sehat seperti sanitasi, akses terhadap air bersih, rumah sehat, merupakan bagian dari variabel kesejahteraan. Jika kita merujuk lagi pada pengertian kemiskinan sebagai kondisi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka lingkungan ini erat kaitannya dengan kebutuhan dasar non makanan seperti pakaian, rumah tinggal, air, sanitasi, dan keperluan lainnya.

Perbaikan lingkungan menjadi salah satu intervensi karena bertujuan untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Hal ini didasari fakta bahwa warga miskin hanya mampu tinggal di lingkungan dengan kualitas infrastruktur tempat tinggal yang tidak memadai. Mereka hanya mampu tinggal di lingkungan kumuh dengan akses sanitasi dan air bersih yang sangat terbatas. Lingkungan yang kumuh akan berkontribusi terhadap rantai kemiskinan. Sebab, lingkungan kumuh yang tidak sehat akan menimbulkan berbagai

penyakit yang akan mengganggu produktivitas mereka. Apalagi, kawasan-kawasan kumuh tersebut kerap berdiri di lokasi-lokasi yang tidak diperuntukkan atau tidak ideal sebagai tempat tinggal, seperti bantaran sungai dan rel kereta api, kolong jembatan, dan lain sebagainya. Situasi bahwa kemiskinan terkait dengan kondisi lingkungan menunjukkan bahwa dimensi kemiskinan tidak semata soal ekonomi—yang karena itu tak hanya membutuhkan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi namun juga membutuhkan konsolidasi yang bersifat infrastruktur.

Berdasarkan berita BPS tanggal 4 Oktober 2019 tentang “Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (40% Ke Bawah), Menurut Provinsi (Persen), 2018-2019”, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengategorikan rumah tangga kumuh dalam sejumlah indikator yang sudah disederhanakan, yakni:

1. Tempat tinggal tidak memiliki akses sumber air minum layak.
2. Tidak memiliki sanitasi layak.
3. Luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi dengan kriteria tertentu menurut jenis atap, lantai, dan dinding.
4. Jika nilai hitung rumah kumuh dari kategori tersebut lebih dari 35%, maka rumah tangga tersebut termasuk rumah tangga kumuh (BPS, 2019).

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020, tingkat kekumuhan perkotaan mencapai 8,34% sedangkan perdesaan 12,19%. Selama ini, kawasan kumuh di perdesaan lebih cepat turun dari perkotaan. Angka penurunannya mencapai 2,22 poin dari tahun sebelumnya sedangkan kota hanya 1,36 poin (BPS, 2019).

Pentingnya Perbaikan Lingkungan Penting dalam Inovasi Pengentasan Kemiskinan:

1. Kategori kemiskinan tidak hanya terkait pendapatan, tapi juga ketersediaan fasilitas dasar yang menunjang kualitas hidup. Perbaikan lingkungan dilakukan untuk mengembalikan fasilitas-fasilitas dasar tersebut untuk mendukung aspek kesejahteraan mereka.
2. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan kumuh rentan untuk terus berada di bawah garis kemiskinan karena membuat mereka sakit-sakitan, tidak produktif, dan berkontribusi terhadap siklus kemiskinan.
3. Perbaikan lingkungan penting untuk memastikan bahwa warga miskin bisa mengakses infrastruktur dasar untuk menunjang kehidupan mereka.
4. Perbaikan lingkungan memungkinkan masyarakat miskin untuk melakukan aktivitas produktif yang membuat mereka mampu berdaya secara ekonomi.
5. Lingkungan yang kumuh hanya akan melanggengkan kemiskinan karena di dalamnya anak-anak rawan mengalami kurang gizi (*stunting*), putus sekolah, tidak memiliki keterampilan untuk bekerja.

D. Intervensi dalam Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi

Salah satu penyebab kemiskinan secara umum adalah akses terhadap sumber daya, terutama sumber daya ekonomi. Masyarakat tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya tersebut karena berbagai sebab, antara lain tidak meratanya infrastruktur, ketimpangan sumber daya antara desa dan kota, dan pembangunan yang terfokus di perkotaan. Pemerataan akses menjadi salah satu masalah yang berkontribusi terhadap kemiskinan meski tidak secara langsung. Karena ketidakmerataan akses itulah yang kemudian menciptakan kesenjangan. Dan substansi dari kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi (Sukmana, 2005).

Sumber daya ekonomi secara sederhana adalah input yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Warga miskin memiliki keterbatasan untuk mengakses sumber daya ekonomi tersebut yang membuat penciptaan nilai tambah barang dan jasa yang mereka miliki atau mereka usahakan menjadi terhambat. Akses terhadap sumber daya ekonomi ini sangat erat kaitannya dengan strategi kedua pengentasan kemiskinan yang diformulasikan Kementerian PPN/Bappenas, yakni peningkatan pendapatan. Bentuk sumber daya ekonomi tersebut berbeda-beda bergantung pada karakter, kondisi, lokasi, hingga akar penyebab kemiskinannya. **Problem yang dihadapi warga miskin umumnya bukan sumber daya alam. Mereka bisa mendapatkan bahan-bahan mentah namun tidak punya cukup sarana dan prasarana untuk mengolahnya hingga memiliki nilai tambah.** Kalaupun bisa mengolahnya, mereka memiliki keterbatasan dalam distribusi atau akses terhadap pasar. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menjual bahan-bahan mentah tersebut langsung ke tengkulak yang tidak akan banyak meningkatkan pendapatan mereka.

Karena itu, lanjutan dari rangkaian intervensi terhadap kemiskinan adalah membuka akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut. Sumber daya ekonomi yang dimaksud tentu berbeda-beda untuk setiap wilayah kemiskinan. Warga miskin di pegunungan tidak akan kesulitan mengakses bahan-bahan mentah seperti hasil-hasil perkebunan. Tapi mereka kesulitan dengan distribusi karena pasar umumnya berada di perkotaan. Mereka juga tidak memiliki sumber daya untuk mengolah bahan-bahan mentah itu agar memiliki nilai tambah. Tidak hanya kesulitan peralatan karena kekurangan sumber daya pendanaan, mereka juga sering dibatasi oleh prasarana dasar seperti listrik atau instalasi air bersih. Maka, intervensi yang bisa dilakukan adalah memperbaiki infrastruktur untuk membuka akses terhadap pasar, penyediaan alat-alat pengolah makanan, memfasilitasi pabrik pengolahan makanan berdiri di wilayah tersebut dengan perjanjian kerjasama yang menguntungkan masyarakat.

Di perkotaan, masyarakat miskin memiliki akses terbatas pada sumber daya ekonomi. Meskipun dapat mengakses pasar, mereka terkendala dalam menyewa tempat untuk berjualan, memaksa mereka menjajakan

dagangannya di pinggir jalan dengan penjualan yang tidak optimal. Intervensi yang dapat dilakukan adalah menciptakan sentra pedagang kaki lima (PKL) agar pendapatan warga miskin meningkat dan infrastruktur ekonomi tersedia untuk mengurangi kemiskinan. Di daerah pesisir, warga miskin memiliki akses terhadap sumber daya laut, namun terbatas pada teknologi pengawetan produk perikanan. Mereka hanya bisa menggunakan teknologi sederhana, sementara teknologi modern hanya tersedia untuk korporasi atau lembaga pelelangan ikan besar. Intervensi yang dapat dilakukan adalah menyediakan fasilitas pengolahan produk perikanan di lokasi-lokasi tersebut untuk mengurangi disparitas akses teknologi pengolahan yang saat ini hanya tersedia di sentra industri besar hasil laut.

Inovasi-inovasi yang bertujuan membuka akses terhadap sumber daya ekonomi ini umumnya memang bersifat konsolidasi infrastruktur. Sejumlah pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota besar, berkolaborasi dengan sektor swasta untuk memfasilitasi akses bagi masyarakat miskin. Pemerintah memfasilitasinya dengan cara meminta komitmen penyerapan tenaga kerja dari para pengelola industri. Ada daerah misalnya yang meminta industri perhotelan dan properti untuk mempekerjakan 30 persen warga ber-KTP daerah tersebut. Bentuk kerjasamanya berupa penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah dengan hotel dan apartemen. Pihak swasta yang mau meneken kontrak mendapat insentif dari pemerintah dengan keringanan pajak atau kemudahan perizinan usaha.

Pengelola tempat penginapan menerapkan *affirmative action*, tetapi masyarakat miskin tetap di seleksi dan ikut training seperti calon pekerja lainnya. Kebijakan serupa bisa diadopsi di industri manufaktur untuk memperluas akses pekerjaan lokal. Pemerintah daerah juga mendorong hotel dan apartemen mempromosikan produk UMKM. Beberapa hotel juga melibatkan UMKM dalam rantai pasok makanan dan minuman. Pendekatan strategis dalam membuka akses ekonomi bervariasi sesuai karakter kemiskinan setiap wilayah. Inovasi yang berhasil di satu wilayah mungkin tidak relevan di wilayah lain.

Pentingnya Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi Penting dalam Inovasi Pengentasan Kemiskinan:

1. Akses terhadap sumber daya ekonomi berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
2. Tanpa akses terhadap sumber daya ekonomi, masyarakat miskin tidak bisa meningkatkan pendapatannya. Akibatnya, mereka akan terus hidup di bawah garis kemiskinan.
3. Akses terhadap sumber daya ekonomi memberi nilai tambah terhadap barang dan jasa yang ditawarkan masyarakat miskin. Nilai tambah itulah yang menjadi daya ungkit agar mereka bisa keluar dari garis kemiskinan.
4. Tidak ada upaya yang memberi kemungkinan lebih besar bagi masyarakat miskin untuk sejahtera kecuali mendekatkan mereka pada sumber daya ekonomi.

E. Intervensi dalam Pemberdayaan Ekonomi

Intervensi lanjutan dalam sekuens pengentasan kemiskinan adalah pada pemberdayaan ekonomi. Dalam runtutan program graduasi, intervensi ini selalu datang belakangan dibanding bantuan sosial. Bisa juga paralel dengan intervensi perbaikan lingkungan. Namun, **pemberdayaan ekonomi harus dilakukan sesudah bantuan sosial karena jika kebutuhan pokok masyarakat miskin belum terpenuhi, maka intervensi dalam pemberdayaan ekonomi tidak akan maksimal.** Akses permodalan, misalnya, terancam tidak dimanfaatkan untuk usaha tapi justru lari ke konsumsi. Begitu juga bantuan alat produktif yang rawan dijual untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Dalam intervensi pemberdayaan ekonomi, pendekatannya bisa spesifik sekaligus sensitif. Spesifik karena intervensi ini hanya diberikan kepada warga miskin yang memiliki faktor-faktor pendukung untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Selain itu, aspek-aspek pendukung lain yang menjadi daya ungkit juga ikut berkontribusi dalam memilih secara spesifik masyarakat miskin yang menjadi sasaran program. Beberapa daya ungkit tersebut antara lain tingkat pendidikan, keterampilan yang dimiliki, hingga pengalaman kerja.

Paralel dengan pendekatan spesifik, intervensi ini juga bisa dilakukan dengan pendekatan sensitif. Yakni, mengembangkan program-program dengan tujuan menciptakan ekosistem perekonomian yang ramah bagi UMKM untuk bertumbuh. Seperti dengan menggelar berbagai pelatihan-pelatihan keterampilan kerja, fasilitasi sertifikasi halal, hingga mengkolaborasikan pelaku usaha dengan perusahaan-perusahaan swasta atau BUMN. Salah satunya dengan mendorong agar UMKM menjadi bagian dari rantai pasok industri di sekitar tempat tinggal mereka dengan tujuan agar UMKM meningkat skala ekonominya. Pemerintah daerah berkepentingan terhadap UMKM agar semakin banyak lapangan kerja yang tercipta. Data dari Kementerian Perekonomian per 2020 menunjukkan bahwa UMKM mendominasi 99 persen keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5 persen dan terhadap penyerapan tenaga kerjanya mencapai 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, 2022).

Pemberdayaan ekonomi sebagai langkah lanjut dalam inovasi pengentasan kemiskinan. Namun, banyak daerah kesulitan karena terfokus pada pelatihan produksi, mengabaikan penciptaan pasar yang vital. Hal ini mengakibatkan masyarakat terjebak pada pelatihan tanpa pengembangan bisnis yang sesungguhnya. Kurangnya riset pasar dalam intervensi ekonomi juga menjadi masalah, membatasi potensi masyarakat miskin. Pasar yang benar-benar menciptakan pendapatan berkelanjutan tidak terwujud tanpa riset pasar, membatasi pertumbuhan bisnis yang berdampak nyata bagi mereka. Masyarakat perlu melepas bantuan dengan memasuki bisnis yang didorong oleh pasar, bukan semata program bantuan, untuk keluar dari kemiskinan.

Warga miskin yang mulai menembus pasar “umum” memang belum tentu sukses. Namun, dalam semua proses pemberdayaan ekonomi yang dijalani itu, paling tidak ada hasil (*output*) ekonomi yang tercipta. Yakni, keuntungan—berapapun jumlahnya, pekerjaan baru yang tercipta, dan hasil yang begitu sulit terjadi tapi akan menopang keberlanjutan kesejahteraan: perubahan budaya di dalam masyarakat miskin. Hal ini terjadi karena penciptaan peluang ekonomi menyatukan para pihak yang berkepentingan: warga miskin yang membutuhkan pekerjaan, perusahaan yang mencari untung, dan pemerintah daerah yang mendapat pajak. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin jebakan kemiskinan masih mengintai karena hanya 50 persen bisnis kecil yang bisa bertahan lebih dari 5 tahun dan 20 persen sudah gugur di tahun pertama (Otar, 2018).

Pentingnya Pemberdayaan Ekonomi Penting dalam Inovasi Pengentasan Kemiskinan:

1. Intervensi terhadap kemiskinan sebenarnya langkah sementara karena tujuan dari semua intervensi tersebut adalah menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Wujud dari aspek berkelanjutan itu adalah masyarakat miskin memiliki aktivitas ekonomi yang membuat mereka berhasil keluar dari garis kemiskinan.
2. Tanpa pemberdayaan ekonomi, intervensi pengentasan kemiskinan hanya akan berputar pada pemberian bantuan-bantuan. Akibatnya, masyarakat tidak akan pernah bisa mandiri menghidupi dirinya sendiri.
3. Mendorong masyarakat miskin untuk berdaya secara ekonomi akan membuat masyarakat miskin menjangkau tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

BAB IV

PENDEKATAN STRATEGIS DALAM INOVASI PENGENTASAN KEMISKINAN

OECD OPSI mendefinisikan inovasi pelayanan publik sebagai implementasi terhadap pengembangan atau peningkatan sebuah produk (baik berupa barang atau jasa). Inovasi pelayanan publik juga berarti proses, atau metode pemasaran baru, atau metode organisasi baru dalam proses bisnis, ruang kerja organisasi atau hubungan eksternal (OECD OPSI, 2014). Definisi tersebut memberi sejumlah kata kunci seperti implementasi, metode pemasaran atau metode organisasi baru, proses bisnis, meski maknanya sama yakni proses bisnis. Dengan kata lain, salah satu aspek terpenting dalam komponen inovasi adalah pada proses bisnisnya. Bagaimana inovasi-inovasi dalam pengentasan kemiskinan menjalankan proses bisnis inovasi tersebut?

Matriks-matriks berikut ini menjelaskan langkah-langkah yang diambil inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan dalam menjalankannya. Selain itu, apa saja konsolidasi sumber daya untuk mendukung langkah tersebut dalam konteks manajemen organisasi. Paling tidak ada lima unsur dalam manajemen yang bisa dikelola untuk mewujudkan langkah-langkah strategis tersebut, yakni *men*, *money*, *materials*, *machines*, dan *method* sebagaimana metode yang dikembangkan sejumlah tokoh seperti Harrington Emerson, Pfiffner John F. dan Presthus Robert V (Herujito, 2001). *Man* merujuk pada sumber daya manusia (SDM) yang dilibatkan, *money* terkait dengan dukungan sumber pendanaan, *material* berkaitan dengan bahan yang digunakan untuk mendukung langkah strategis tersebut, *machine* terkait dengan teknologi dan infrastruktur yang digunakan untuk mewujudkannya sedangkan *method* adalah penetapan cara melaksanakan tugas.

A. Pendekatan Strategis dalam Perbaikan Data

Langkah-langkah strategis dalam perbaikan data kurang lebih terbagi dalam tiga kerja besar. Satu, verifikasi dan validasi data kemiskinan di lapangan. Kedua, mengintegrasikan data yang mampu mengakomodir kebutuhan berbagai *stakeholder* dalam pengentasan kemiskinan agar memiliki satu data kemiskinan yang terintegrasi dan *interoperable*. Ketiga, mengolah data-data tersebut untuk dilakukan analisis strategis terkait akar penyebab kemiskinan, demografi kemiskinan, pemetaan, dan *assessment* agar menajamkan upaya targeting dalam intervensi kemiskinan.

No.	Langkah Strategis	Kebutuhan Sumber Daya				
		Man	Money	Method	Material	Machine
1.	Melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan daerah	Memanfaatkan petugas yang tersedia di lapangan seperti kader kesehatan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas kelurahan, RT/RW, untuk membantu melakukan verifikasi lapangan berdasarkan data awal kemiskinan yang dimiliki. Bisa juga dibentuk tim khusus verifikasi dan validasi untuk menguatkan program meski ini akan menambah biaya.	Perlu penganggaran biaya untuk honor petugas. Namun, honor tidak akan terlalu banyak jika memanfaatkan petugas lapangan yang tersedia. Tinggal menambahkan tugas baru dan insentif baru, jauh lebih besar biayanya jika membentuk petugas baru.	Metode dari pintu ke pintu bisa dilakukan	Menyiapkan formulir yang tidak hanya berisi data nama dan alamat. Tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan profil kemiskinan seperti pendidikan, pekerjaan, skill yang dimiliki, pengalaman kerja, dan lain sebagainya.	Aplikasi yang memudahkan petugas untuk mengisi formulir yang membuat data bisa langsung diunggah secara <i>real time</i> .
2.	Menjemput data kemiskinan dengan mendirikan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di desa-desa agar masyarakat bisa melaporkan kemiskinan yang dialami dirinya atau orang lain.	Memanfaatkan perangkat desa untuk melayani warga yang melaporkan kemiskinan.	Penganggaran pendirian Puskesmas. Agar biaya tidak membengkak, sebaiknya menggunakan kantor kepala desa.	Terkadang petugas tidak bisa menjangkau warga miskin semuanya, karena itu, Puskesmas membuka pintu bagi warga yang mau datang melaporkan diri kapan saja dengan keluhan apa saja untuk diproses	Formulir pelaporan kemiskinan berupa aplikasi untuk mempercepat input data	Aplikasi khusus internal yang mendukung input data secara cepat
3.	Mengintegrasikan data dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan kemiskinan dalam satu data terpadu yang <i>interoperable</i> dan <i>update</i> .	Merekrut <i>programmer</i> atau tenaga teknologi informasi untuk membantu mengembangkan data terpadu kemiskinan daerah yang menghimpun berbagai kebutuhan <i>stakeholder</i> terhadap data kemiskinan.	Budgeting untuk server, aplikasi, dan admin operator data.	Membuat satu item data yang komprehensif yang memuat semua kebutuhan berbagai <i>stakeholder</i> kemiskinan.	-	-

4.	Mengelola satu data terpadu daerah yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan stakeholder.	Menyiapkan operator di setiap dinas yang terkait dengan data kemiskinan daerah. Operator di Dinas Sosial, Dinas PMD, Dispendukcapil,	-	Membuat SK tim pengentasan kemiskinan lintas OPD yang dikuatkan SK Bupati.	-	-
5.	Analisis data kemiskinan	Analisis data	-	Mengolah data kemiskinan melalui berbagai pendekatan. Mulai dari pendekatan aspek <i>basic skill</i> , aspek demografi, kewilayahan (pesisir, kawasan kota, atau pegunungan), untuk kemudian menajamkan langkah-langkah intervensinya.	-	-

Tabel 1 Pendekatan Strategis dalam Perbaikan Data

Secara ringkas, pendekatan strategis dalam intervensi perbaikan data dapat dilihat melalui langkah-langkah berikut:

1. Membuat pengelolaan data secara terintegrasi berbasis teknologi informasi.
2. Mengelola satu data terpadu daerah yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan stakeholder.
3. Membuka pintu partisipasi masyarakat untuk melaporkan data kemiskinan, baik dirinya sendiri atau orang lain.
4. Menjemput data dengan cara membuka pos-pos atau pusat-pusat pelaporan kemiskinan di semua kecamatan atau kecamatan-kecamatan dengan jumlah kemiskinan tinggi
5. Menggerakkan petugas lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Petugas bisa dari organisasi pemerintah daerah (OPD) yang terkait kemiskinan atau para relawan yang terdaftar dan dibekali dengan pengetahuan tentang pendataan
6. Jika kebutuhan biaya petugas lapangan tersebut di atas terlalu besar, bisa mengkolaborasikan dengan petugas lapangan lain seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kader lingkungan, dan kader kesehatan.
7. Menggandeng organisasi masyarakat untuk ikut membantu dalam pendataan kemiskinan.

B. Pendekatan Strategis dalam Pemberian Bantuan Sosial

Berdasarkan data yang sudah diperbaiki dalam intervensi sebelumnya, pemberian bantuan sosial bersifat sebagai tindak lanjut. Pertama, pemberian bantuan sosial dapat dioptimalkan dengan menentukan skala prioritas kelompok masyarakat miskin, melalui pembuatan kategorisasi berdasarkan urgensi atau keparahan tingkat kemiskinan.

Kedua, karena keterbatasan kemampuan daerah, pemberian bantuan sosial dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah perusahaan, baik swasta maupun BUMN, dan lembaga amal, baik berbasis agama maupun non agama, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LazisNU), Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LazisMU), atau *startup* amal digital KitaBisa.

No.	Langkah Strategis	Kebutuhan Sumber Daya				
		Man	Money	Method	Material	Machine
1.	Membuat skala prioritas pemberian bantuan sosial berdasarkan kategorisasi tertentu. Bisa dengan faktor kondisi kemiskinan seperti lansia, difabel, dan tingkat keparahan kemiskinan lainnya.	Merekrut tenaga ahli/profesional untuk membantu mengembangkan data terpadu kemiskinan daerah.	Budgeting untuk konsolidasi data kemiskinan	Melakukan simulasi beragam opsi pemberian bantuan sosial untuk mencapai alternatif terbaik antara bantuan yang terbatas dan upaya memaksimalkan jangkauan penerima	-	-
2.	Optimasi bentuk bantuan sosial yang akan diberikan sesuai dengan <i>mapping</i> kondisi daerah. Ada beberapa bentuk bantuan sosial: a. Bantuan sembako b. Bantuan makanan harian yang diproduksi oleh UMKM sekitar dengan biaya dari pemerintah daerah c. Bantuan Universal Health Coverage yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.	-	Menanggung kebutuhan biaya pembelian sembako, makanan, dan jaminan kesehatan universal (UHC)	-	a. Sembako terdiri dari beras, minyak goreng. b. Makanan siap santap dalam rantang atau wadah yang higienis yang bisa kembali dipakai. c. Kartu BPJS	-
3.	Kolaborasi dengan sejumlah perusahaan, baik swasta maupun BUMN, dan lembaga amal, baik berbasis agama maupun non agama, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LazisNU), Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LazisMU), atau <i>startup</i> amal digital KitaBisa.	-	-	a. Membentuk forum CSR yang menghimpun sejumlah perusahaan swasta dan BUMN b. Kerjasama dengan lembaga amal c. Kerjasama dengan organisasi masyarakat yang menaungi lembaga amal tersebut	-	Puskesmas: Pusat Kesejahteraan Sosial yang didirikan di setiap kecamatan prioritas kemiskinan.
4.	Pemberian beasiswa pada masyarakat miskin usia sekolah	-	Biaya dianggarkan dari APBD, CSR perusahaan, dan lembaga amal.	Karena beasiswa kerap terbatas, bisa dilakukan dengan memberikan prioritas terhadap siswa dengan tingkat keparahan	Beasiswa tidak hanya untuk siswa sekolah tapi juga untuk mahasiswa. Bantuan tidak hanya SPP, bisa juga berupa bantuan tempat	-

				kemiskinan atau berbasis prestasi sekolah.	tinggal dengan memanfaatkan gedung milik pemerintah daerah di kota besar	
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2 Pendekatan Strategis dalam Pemberian Bantuan Sosial

Dari matriks tersebut, secara ringkas dapat dilihat langkah-langkah optimalisasi pemberian bantuan sosial sebagai berikut:

1. Membuat skala prioritas penerimaan bantuan sosial karena jumlahnya yang terbatas.
2. Melakukan optimalisasi bantuan sosial dengan mengintegrasikan dengan intervensi penanganan kemiskinan lainnya.
3. Bantuan sosial tidak bisa jika hanya ditanggung oleh APBD atau APBD karena jumlahnya tidak akan cukup untuk mengover semua kebutuhan masyarakat miskin. Karena itu, perlu dukungan untuk penambahan jumlah bantuan melalui kerjasama dengan lembaga amil zakat milik organisasi kemasyarakatan, lembaga filantropi, perusahaan swasta atau BUMN di wilayah tersebut.
4. Membuat terobosan pemberian bantuan sosial yang bersifat tematik berbasis klaster seperti pemberian makanan setiap hari untuk lansia dan yatim piatu.
5. Daerah-daerah dengan jumlah APBD yang tinggi akan mampu untuk melakukan berbagai terobosan dalam pemberian bantuan sosial karena kekuatan sumber dayanya. Namun daerah dengan APBD yang rendah selalu kesulitan memberikan bantuan sosial karena tidak banyak alokasi anggarannya. Karena itu, perlu untuk mengidentifikasi sumber daya yang bisa diakses untuk ikut menopang pemberian bantuan sosial.

C. Pendekatan Strategis dalam Perbaikan Lingkungan

Perbaikan lingkungan menjadi bagian dari intervensi pengentasan kemiskinan karena lingkungan ikut berkontribusi terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Berbagai inovasi dalam perbaikan lingkungan berfokus pada infrastruktur dasar seperti sanitasi, jambanisasi, instalasi listrik, air bersih, dan perbaikan rumah tidak layak huni. Fokus utama dari intervensi ini adalah menghapus permukiman kumuh dan memperbaiki rumah keluarga miskin.

No.	Langkah Strategis	Kebutuhan Sumber Daya				
		Man	Money	Method	Material	Machine
1.	Mengidentifikasi kawasan kumuh atau daerah yang belum memiliki infrastruktur dasar.	-	-	Memanfaatkan data kemiskinan dengan pemilahan kawasan-kawasan kantong kemiskinan	-	-
2.	Menjalin kerjasama dengan BUMN yang terkait dengan infrastruktur dasar tersebut seperti instalasi listrik dengan PLN, instalasi komunikasi dengan Telkomsel.	-	-	-	-	-
3.	Mengarahkan perbaikan atau pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum pada kawasan-kawasan kumuh.	Dengan skema padat karya, memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut memperbaiki lingkungannya. Dengan demikian, manfaatnya bisa ganda: lapangan kerja dan penghapusan kawasan kumuh.	Budgeting untuk padat karya dan kebutuhan perbaikan fisik.	-	-	-
4.	Kerjasama dengan pabrik-pabrik bahan bangunan seperti pabrik cat atau BUMN produsen semen untuk bisa mengakses material bangunan murah.	-	-	-	-	-

Tabel 3 Pendekatan Strategis dalam Perbaikan Lingkungan

Secara ringkas pendekatan strategis pengentasan kemiskinan dengan perbaikan lingkungan dapat dilihat melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kawasan kumuh konsentrasi tempat tinggal masyarakat miskin
2. Mengidentifikasi rumah tidak layak huni untuk dilakukan perbaikan rumah tinggal.
3. Membuat skala prioritas penerima program perbaikan rumah untuk warga yang memiliki rumah tidak layak huni seperti lansia atau difabel.
4. Membangun infrastruktur dasar seperti instalasi listrik, saluran air, sanitasi.
5. Membangun jamban untuk perkampungan yang masih buang air besar di sungai.

D. Pendekatan Strategis dalam Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi

Intervensi dalam akses terhadap sumber daya berkaitan erat dengan infrastruktur jalan, perbaikan atau pembangunan fisik, dan membuka hambatan-hambatan keterhubungan antara masyarakat miskin yang memiliki akses luas terhadap bahan-bahan mentah dan pasar. Menentukan definisi sumber daya ekonomi yang mampu berkontribusi pada pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada konteks wilayah.

No.	Langkah Strategis	Kebutuhan Sumber Daya				
		Man	Money	Method	Material	Machine
1.	Mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan dan hambatan mereka terhadap sumber daya ekonomi.	-	-	-	-	-
2.	Mengidentifikasi sumber daya ekonomi terdekat yang bisa dijangkau masyarakat dan memfasilitasi akses mereka terhadap sumber daya tersebut.	-	-	-	-	-
3.	Memperbaiki infrastruktur jalan penghubung permukiman, revitalisasi pasar tradisional, pembangunan sentra kaki lima	-	Anggaran untuk perbaikan jalan, pasar tradisional, dan sentra kaki lima	-	-	-
4.	Memfasilitasi akses masyarakat terhadap koneksi digital untuk membuka peluang ekonomi digital.	-	-	Bekerja sama dengan BUMN telekomunikasi untuk memberikan spot-spot wifi gratis di fasilitas publik seperti balai desa, balai RW, atau taman.	-	-
5.	Transportasi murah untuk masyarakat miskin karena transportasi adalah salah satu kontributor inflasi terbesar.	-	-	Pengadaan bus sekolah gratis	-	-

Tabel 4 Pendekatan Strategis dalam Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi

Secara ringkas pendekatan strategis pengentasan kemiskinan dengan akses terhadap sumber daya ekonomi dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kawasan-kawasan konsentrasi masyarakat miskin
2. Mengidentifikasi sumber daya yang bisa dijangkau di sekitar kawasan tersebut.
3. Memperbaiki infrastruktur jalan yang menghubungkan sumber-sumber ekonomi masyarakat
4. Memperbaiki infrastruktur ekonomi seperti pasar tradisional, sentra kaki lima, dan berbagai aspek yang mendukung penciptaan pasar bagi masyarakat.
5. Membangun infrastruktur pengolahan bahan-bahan mentah di sumber-sumber komoditas ekonomi masyarakat.

E. Pendekatan Strategis dalam Pemberdayaan Ekonomi

Sebagian besar intervensi pemberdayaan ekonomi yang dilakukan menyoar masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha meskipun dalam skala kecil. Oleh karena itu, intervensi pemberdayaan ekonomi dalam konteks pengentasan kemiskinan adalah dengan memfasilitasi peningkatan skala usaha melalui bantuan peralatan usaha, bantuan pemodal, dan bantuan akses terhadap pasar yang lebih luas. Selain langkah-langkah yang menyoar individu, intervensi pemberdayaan ekonomi juga bisa dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak swasta yang bergerak di sektor tertentu untuk memberi ruang bagi tenaga kerja miskin yang berasal dari wilayah tersebut. Kebijakan afirmasi ini tentunya tetap diikuti dengan kecakapan dasar agar tenaga kerja tersebut mampu memenuhi kebutuhan perusahaan.

No.	Langkah Strategis	Kebutuhan Sumber Daya				
		Man	Money	Method	Material	Machine
1.	Identifikasi masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha dengan syarat-syarat visibilitas usaha yang sederhana dan mendasar	Konsolidasi petugas lapangan	-	-	-	-
2.	Memberikan bantuan usaha produktif sesuai dengan jenis usaha masyarakat miskin.	-	Anggaran untuk pembelian barang-barang produktif	Pelatihan penggunaan barang-barang produktif	Barang-barang produktif yang mendukung usaha masyarakat miskin	Peralatan masak, perlengkapan jualan, data pedagang binaan
3.	Pelatihan manajemen dasar pengelolaan usaha	Pendamping UMKM	Anggaran narasumber untuk lokakarya UMKM	-	Materi manajemen produksi dan pembukuan sederhana, serta pengemasan produk	-
4.	Membuka akses permodalan	Menggandeng bank daerah untuk ikut memberi modal usaha kecil dengan bunga ringan dan pendampingan dari petugas bank agar UMKM bisa <i>bankable</i>	Bunga modal ringan dengan subsidi terhadap bunga bank yang dibiayai pemerintah daerah	Memberikan produk pembiayaan perbankan yang khusus untuk UMKM milik masyarakat miskin	Modal usaha	-
5.	Menggandeng perusahaan untuk merekrut tenaga kerja dari masyarakat miskin	-	Memberi kemudahan atau keringanan pajak dan benefit perizinan lainnya kepada perusahaan yang merekrut masyarakat miskin sebagai pekerjanya	Nota kesepahaman antara pemerintah dengan perusahaan	Insentif pajak	-

Tabel 5 Pendekatan Strategis dalam Pemberdayaan Ekonomi

Secara ringkas pendekatan strategis pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi dapat dilihat melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masyarakat miskin yang memiliki keterampilan untuk melakukan aktivitas usaha.
2. Memberikan bantuan peralatan usaha produktif
3. Fasilitasi pelatihan-pelatihan manajemen usaha kecil
4. Membuka akses terhadap permodalan dengan bunga ringan
5. Mendorong agar usaha kecil menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan belanja pemerintah daerah
6. Memfasilitasi akses pasar usaha kecil ke perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN
7. Memfasilitasi agar industri-industri menyerap tenaga kerja bagi masyarakat miskin di wilayah sekitar

BAB V

PEMBELAJARAN DARI INOVASI PENGENTASAN KEMISKINAN

Sejak KIPP diselenggarakan pada 2014, hampir setiap tahun muncul inovasi-inovasi yang dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fokus sasaran inovasi bervariasi bergantung pada isu-isu yang dianggap urgen untuk segera diselesaikan dalam konteks pengentasan kemiskinan. Salah satu inovasi yang dapat dijadikan pembelajaran untuk menciptakan atau mengembangkan inovasi dalam pengentasan kemiskinan adalah **Inovasi Laboratorium Kemiskinan dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan**.

A. Profil Inovasi

Inovasi Laboratorium Kemiskinan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu, tepat program, tepat sasaran serta tepat guna sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan relatif tinggi yaitu 13% sementara penurunan rata-rata angka kemiskinan hanya 0,19% yang tidak sebanding dengan anggaran pengentasan kemiskinan rata-rata per tahun yaitu 230 miliar. Inovasi Laboratorium Kemiskinan diinisiasi sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan dimana penanggulangan kemiskinan masih bersifat *business as usual*, bersifat sentralistik, bersifat eksklusif, miskin inovasi, tidak berbasis data, tidak berbasis analisis permasalahan.

Inovasi Laboratorium Kemiskinan dilakukan dengan cara pengelompokan yang mewakili tipe topografi wilayah Kabupaten Pekalongan, yaitu wilayah pesisir Pantai, wilayah perkotaan, dan wilayah pegunungan. Penanganan kemiskinan untuk tiap topografi memiliki perbedaan. Hal tersebut dilakukan dengan memberdayakan masyarakat, membangun serta mengembangkan potensi dan Sumber Daya Alam masing-masing wilayah.

B. Alur Proses - Pendekatan Sistem

1. Input

Langkah awal dalam implementasi inovasi Laboratorium Kemiskinan adalah memastikan ketersediaan anggaran serta data-data yang diperlukan sebagaimana salah satu intervensi dalam pengentasan kemiskinan adalah perbaikan data.

- a. Tersedia anggaran yang spesifik. Anggaran disusun dengan jelas akan digunakan oleh siapa dan untuk apa.
- b. BDT/DTKS/DP3KE (Basis Data Terpadu/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang sudah dikelompokkan.

2. Proses

Implementasi Laboratorium Kemiskinan merupakan proses berbentuk siklus atau dapat dilakukan berulang-ulang sampai menghasilkan output

yang sesuai dengan permasalahan. Dimulai dengan mengolah data, kemudian melakukan identifikasi atau diagnosis sampai merumuskan alternatif-alternatif penyelesaian masalah.

- a. Pendekatan Spasial, By Name By Address (BNBA) by Problem
 - 1) Penggunaan Data P3KE Dari Kemenko PMK
 - 2) Olah Data Untuk Mengetahui :
 - a) Tingkat Kesejahteraan Sosial
 - b) KRT Program Tidak Menerima Perlindungan Sosial
 - c) Rumah Tidak Layak Huni
 - d) Sumber Penerangan Utama
 - e) Sumber Air Minum Utama
 - f) Fasilitas Buang Air Besar
 - g) Status Pekerjaan
 - 3) Menentukan Desa Lokus Hasil Dari Pemetaan Desa Tingkat Kesejahteraan Rendah Serta Menentukan Program/Intervensi.
- b. Pendekatan *Participatory, Poverty, Assessment* (PPA) untuk merumuskan alternatif solusi dalam mengentaskan kemiskinan.
 - 1) Sebagai instrumen dengan memasukkan cara pandang orang miskin dalam analisis kemiskinan dalam analisis kemiskinan dan formulasi strategi pengurangan kemiskinan melalui perumusan kebijakan publik.
 - 2) Mengembangkan relasi baru antara pembuat kebijakan, lembaga, atau organisasi non-pemerintah, dan lapisan miskin (struktural atau kultural).
 - 3) Melakukan diagnosis kemiskinan dengan memberikan jawaban tentang:
 - a) Siapa Si Miskin?
 - b) Di mana mereka tinggal?
 - c) Bagaimana mereka mencari penghasilan?
 - d) Apa penyebab mereka miskin?
 - e) Bagaimana mereka lepas dari masalah kemiskinan?
 - 4) Alat/metodologi yang digunakan
 - a) Klasifikasi kesejahteraan
 - b) Pemetaan Sumber Daya
 - c) Analisis mata pencaharian
 - d) Analisis kecenderungan 5
 - e) Kalender musim
 - f) Analisis penyebab kemiskinan.

Salah satu contoh hasil *Participatory, Poverty, Assessment* (PPA) di Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

No	Masalah Utama	Sebab	Solusi/Apa yang bisa dilakukan
1	Tidak ada pekerjaan	Tidak ada lapangan kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mencarikan lap. Kerja ▪ Bantuan ternak
		Fisik tidak mampu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bantuan
		Tidak ada ketrampilan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan ketrampilan sapu
2	Rumah tidak layak	Tidak ada biaya untuk renovasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gotong royong ▪ Diusulkan untuk mendapat bantuan RTLH
3	Tidak ada modal usaha	Tidak memiliki jalur/ akses permodalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bantuan permodalan ▪ Pendampingan untuk manajemen usaha
4	Keterbatasan bahan baku dan pemasaran produk sapu	Terbatasnya jaringan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi bahan baku dan pemasaran oleh pemda dan pihak lain ▪ Pembentukan koperasi usaha Sapu

Gambar 3 Contoh Identifikasi

- c. Implementasi inovasi Laboratorium Kemiskinan melibatkan peran pentahelix (Pemerintah kabupaten dengan resources APBD, pemerintah desa, forum CSR, dan perguruan tinggi (UNDIP, UNS, IPB, dll), kelompok masyarakat peduli (ormas, NGO, dan Muhammadiyah).

3. Output:

Formulasi Kebijakan

C. Strategi

Laboratorium Kemiskinan mengusung konsep pentahelix yaitu kolaborasi antara Pemerintah baik Pemerintah Kabupaten Pekalongan hingga Pemerintah Desa, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, kelompok masyarakat peduli dan media. Keterlibatan semua pihak dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Kolaborasi Pentahelix dalam Laboratorium Kemiskinan:

- a. Pemerintah daerah (22 kegiatan/program pada 9 OPD).
- b. Masyarakat peduli (kerelawanan dan social capital).
- c. Pemerintah desa (pengalokasian anggaran desa, terutama untuk perbaikan jalan, RTLH, dan jamban).
- d. Dunia usaha (CSR).
- e. Perguruan tinggi (KKN tematik dan wilayah binaan).

Kolaborasi antar pentahelix menghasilkan strategi pengentasan kemiskinan sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan
 - 1) Peningkatan hasil produksi pertanian/perkebunan (pegunungan)
 - 2) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah (perkotaan)
 - 3) Peningkatan hasil produksi perikanan/peternakan (pesisir)
2. Pengurangan beban

Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar (pegunungan, perkotaan, pesisir).

D. Penguatan Keberlanjutan

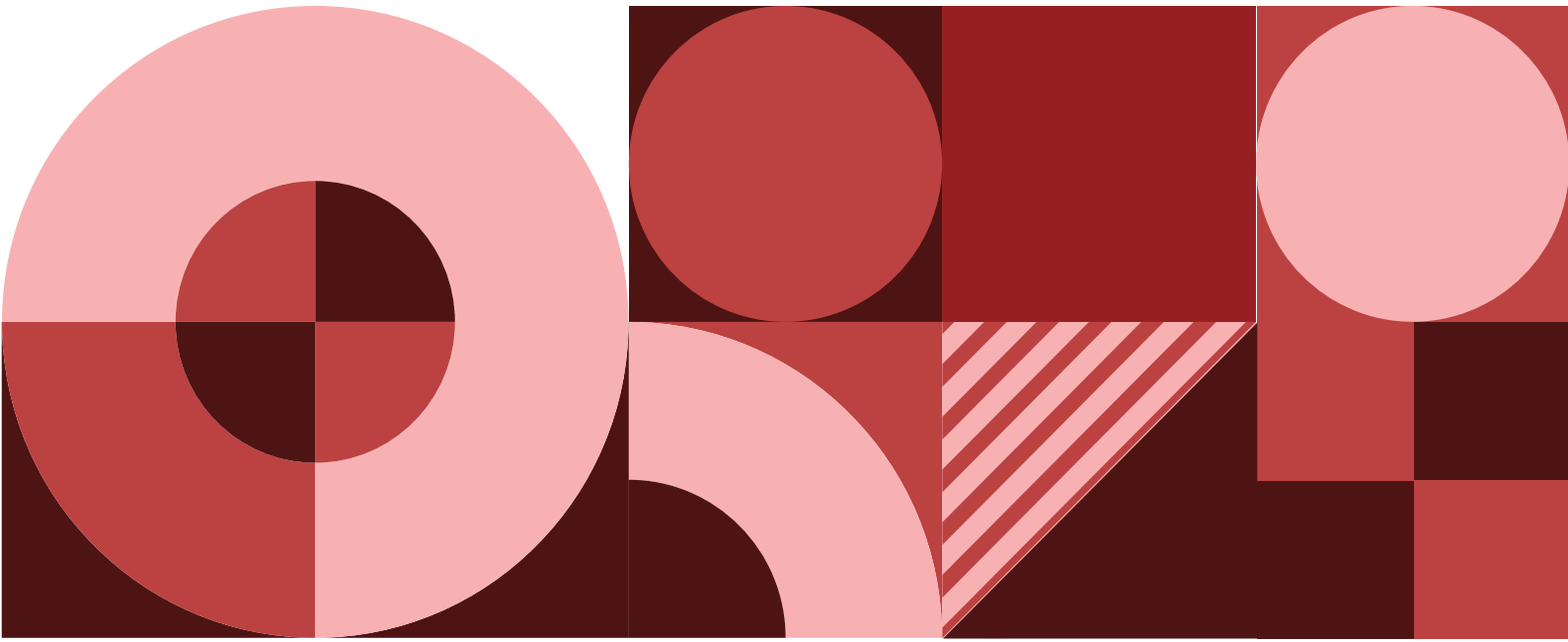
1. Strategi Keberlanjutan Institusional
 - 1) Peraturan Bupati No. 97 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah,
 - 2) Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan,
 - 3) Perbup No. 57 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026
 - 4) Pengintegrasian kedalam dokumen RKPD dan RPJMD
2. Strategi Keberlanjutan Sosial
 - a. Pelibatan helix dari tahap hingga evaluasi program.
 - b. Meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat.
 - c. Mengimplementasikan model mata pencaharianberkelanjutan.
3. Strategi Keberlanjutan Manajerial

Sinergitas antar helix. Hasil PPA-LFA menjadi bahan penyusunan program kegiatan OPD dan Pemerintah Desa dan menentukan peran bagi dunia usaha dan masyarakat peduli.

DAFTAR PUSTAKA

- Azevedo, J. P. (n.d.). *Power Measurement, From Noise To Signal and How The Media Can Help*.
- BPS. (2019, Oktober 4). Retrieved Desember 13, 2023, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU2MSMy/persentase-rumah-tangga-kumuh-perkotaan-40-ke-bawah-menurut-provinsi.html>
- BPS. (2023, Juli 17). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Retrieved Desember 13, 2023, from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Gandhawangi, S. (2023). *Bansos Tidak Tepat Sasaran, Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah Per Bulan*. *Harian Kompas*.
- Herujito, Y. M. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Irawan, K. I. (2020). *Masalah Menahun Disparitas Kemiskinan Desa-Kota*. *Harian Kompas*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. (2022). *Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. Siaran Pers.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. (2022). *Perkembangan UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. Siaran Pers.
- Kumar, S. (2023, Agustus 15). Retrieved from Sequencing Interventions in the Graduation Approach: A Guide to Effective Program Delivery: Sequencing Interventions in the Graduation Approach: <https://bracupgi.org/news-updates/economic-inclusion/sequencing-interventions-in-the-graduation-approach/>
- Kustiasih, R. (2020). *Ketertinggalan Tuntut Inovasi Daerah*. *Harian Kompas*.
- Majalah Tempo. (2022). *Gerak Cepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*.
- OECD. (2020). The Public Sector Innovation Lifecycle: A device to assist teams and organisations in developing a more sophisticated approach to public sector innovation. *OECD Working Papers on Public Governance No. 37*.
- OECD OPSI. (2014). *Innovating The Public Sector: From Ideas to Impact*.
- Otar, C. (2018, Agustus 25). *What Percentage of Small Business Fail and How Can You Avoid Being One?* Retrieved Agustus 21, 2023, from <https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2018/10/25/what-percentage-of-small-businesses-fail-and-how-can-you-avoid-being-one-of-them/?sh=73390a3a43b5>
- PBB. (1996). <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/mat/article/view/14914/5663>. Retrieved Desember 13, 2023, from <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/mat/article/view/14914/5663>
- Purnamasari, D. M. (2023, September 5). *Kementerian PPPA: 5 Juta Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran*.

- Purnamasari, D. M. (2023, September 5). *Kementerian PPPA: 5 Juta Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/12032361/kementerian-pppa-5-juta-anak-belum-memiliki-akta-kelahiran>
- Purnamasari, D. M., & Erdianto, K. (2021, Februari 9). Retrieved September 5, 2023, from Kementerian PPPA: 5 Juta Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran: <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/12032361/kementerian-pppa-5-juta-anak-belum-memiliki-akta-kelahiran>
- Sukmana, O. (2005). *Sosiologi dan Politik Ekonomi*. Malang: UMM Press.
- Suryana. (2014). *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- World Bank. (2021). *Stronger Data Systems Needed to Fight Poverty*. Siaran Pers.
- World Bank. (2022, September 14). Retrieved Desember 13, 2023, from <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2022/05/02/fact-sheet-an-adjustment-to-global-poverty-lines>
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. (2020). *Sumber Daya & Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali.



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif